

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung Tahun 2018 dapat menggambarkan kinerja Dinas dan Evaluasi terhadap kinerja Dinas yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 (empat) sasaran, secara umum telah mencapai nilai 102,99 % yang termasuk dalam interpretasi *memuaskan*. Dalam Tahun Anggaran 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung sebesar Rp. 541.683.944.526,48 dimana realisasi anggaran mencapai Rp. 360.317.382.660,- atau dengan serapan dana APBD 66,52 %, dan SILPA Rp. 181.366.561.866,48.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung 2013-2018 menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja yang mengalami Sasaran dan Indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kerja Tahun 2018 dengan rincian pencapaian sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 110,41 % dengan interpretasi memuaskan.

Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100 % dengan interpretasi memuaskan.

Sasaran 3 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 100 % dengan interpretasi memuaskan.

Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,13 % atau interpretasi memuaskan.

Dari hasil pengukuran kinerja dan evaluasi secara keseluruhan, terdapat kinerja yang perlu ditingkatkan untuk Tahun 2018 antara lain :

1. Pembangunan jalan dan jembatan perlu ditingkatkan kuantitasnya untuk mengatasi masalah transportasi serta meningkatkan aksesibilitas antar pusat-pusat pelayanan kegiatan;
2. Pemeliharaan jalan dan jembatan perlu dipertahankan kondisinya serta ditingkatkan kualitasnya;
3. Pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase/ gorong-gorong;
4. Pembangunan dan revitalisasi trotoar yang ramah bagi pejalan kaki dan kaum difabel;
5. Pemerataan pembangunan penerangan jalan umum;
6. Pemeliharaan dan peningkatan kondisi penerangan jalan umum;
7. Meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pemanfaatan infrastruktur kebinamargaan, penerangan jalan dan pengairan di Kota Bandung;
8. Meningkatkan manajemen pengawasan dan monitoring pada setiap kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, akhirnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung ini dapat diselesaikan.

Dalam proses penyusunannya senantiasa berupaya mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih atas bimbingan dan perhatian yang telah diberikan terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak H. ODED M. DANIAL, selaku Wali Kota Bandung
2. Bapak H. YANA MULYANA, selaku Wakil Wali Kota Bandung
3. Bapak H. EMA SUMARNA, selaku Plt. Sekretaris Daerah Kota Bandung
4. Kepada semua pihak, baik tim penyusun laporan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung maupun rekan/teman sejawat di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang telah memberikan informasi, saran, kritik dan pendapat yang bersifat membangun guna penyempurnaan laporan ini.

Semoga Allah Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dengan harapan segala upaya yang dilaksanakan menjadi bukti nyata pengabdian kita kepada masyarakat.

Akhirnya kami berharap semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung khususnya dan Pemerintah Kota Bandung pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandung, Januari 2019

**KEPALA DINAS  
PEKERJAAN UMUM**



**Ir. H. ARIF PRASETYA S, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 196008251990111001

## DAFTAR ISI

<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Gambaran Umum OPD .....	1
1.2 Tugas dan Fungsi OPD .....	4
1.3 Isu Strategis yang dihadapi OPD .....	5
1.4 Sistematika .....	6
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>8</b>
2.1. Perencanaan Strategis .....	8
2.1.1 Rencana Strategis .....	8
2.1.2 Indikator Kinerja Utama .....	15
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>21</b>
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama .....	22
3.2 Pengukuran Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2018...24	
3.2.1 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1 : <i>Terwujudnya Infrastruktur Jalan yang Berkualitas dan Merata</i> .....	25
3.2.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 3 : <i>Terwujudnya Bandung Caang Baranang</i> .....	30
3.2.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 3 : <i>Terselesaikannya Permasalahan Banjir di Kota Bandung</i> .....	33
3.2.4 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 4 : <i>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik yang Prima</i> .....	39
3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Standart Nasional maupun Instansi Lain .....	41

3.4 Pengukuran Evaluasi dan Analisa Capaian Terhadap Target Renstra.....	42
3.5 Akuntabilitas Keuangan .....	45
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
DAFTAR TABEL .....	vii
Lampiran	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon Tahun 2018 .....	1
Tabel 1.2	Daftar Peralatan Berat Penunjang Kegiatan Kebinamargaan..	2
Tabel 2.1	Sasaran, Tujuan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung .....	10
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung .....	16
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung .....	18
Tabel 2.4	Perencanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung Tahun 2018.....	19
Tabel 3.1	Predikat Nilai Capaian Kinerja	21
Tabel 3.2	Capaian IKU Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung .....	23
Tabel 3.3	Sasaran, Indikator serta Formulasi Perhitungan Sasaran 1...	25
Tabel 3.4	Pencapaian Indikator Sasaran 1 .....	26
Tabel 3.5	Sasaran, Indikator serta Formulasi Perhitungan Sasaran 2...	30
Tabel 3.6	Pencapaian Indikator Sasaran 2 .....	30
Tabel 3.7	Sasaran, Indikator serta Formulasi Perhitungan Sasaran 3...	33
Tabel 3.8	Pencapaian Indikator Sasaran 3 .....	34
Tabel 3.9	Sasaran, Indikator serta Formulasi Perhitungan Sasaran 4...	40
Tabel 3.10	Pencapaian Target Sasaran Tahun 2018 .....	43
Tabel 3.11	Kategori Pencapaian Indikator Sasaran Tahun 2018 .....	44
Tabel 3.12	.....	44

Tabel	Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota	
3.13	Bandung Tahun 2018 .....	46
Tabel	Efektivitas Anggaran Tahun Capaian Sasaran Dinas	
3.14	Pekerjaan Umum Kota Bandung .....	47
Tabel	Analisis Efisiensi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota	
3.15	Bandung Tahun 2018 .....	48
Tabel	Penyerapan Anggaran pada Setiap Sasaran Dinas	
3.16	Pekerjaan Umum Kota Bandung Tahun 2013-2018 .....	50
Tabel	Rekomendasi Peningkatan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum	
3.17	Kota Bandung .....	51



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 GAMBARAN UMUM OPD**

Pemerintah Kota Bandung membentuk OPD berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 8 Tahun 2016 tanggal 18 Nopember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung yang merupakan Pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Salah satu OPD yang dibentuk adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Wali Kota.

Berdasarkan data bagian kepegawaian DPU tahun 2018 jumlah total pegawai mencapai 335 orang, dengan jumlah pejabat struktural berjumlah 34 orang dan staf pelaksana sebanyak 301 orang.

**Tabel 1.1**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon**  
**Tahun 2018**

<b>ESELON</b>	<b>JUMLAH (Orang)</b>
I	-
II	1
III	4
IV	29
FUNGSIONAL UMUM	301
<b>TOTAL</b>	<b>335</b>

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 1.1, tingkat pendidikan karyawan DPU yang paling banyak adalah pendidikan SMA sebanyak 166 orang (49,65 %). Sisanya memiliki pendidikan sebagai Diploma dan Sarjana, baik Strata 1 dan Strata 2. Tingkat pendidikan karyawan DPU

yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam mendukung peningkatan kinerja DPU secara umum.

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut :

**Tabel 1.2**  
**Daftar Peralatan Berat Penunjang Kegiatan Kebinamargaan**

No	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	Jumlah	Tahun Pembelian
1.	Excavator	Komatsu, Caterpillar	2	1991.2012
2.	Excavator Long Arm	Caterpillar	1	2014
3.	Mini Excavator	Caterpillar	1	2014
4.	Mini Excavator Full Rotary	Takeuchi	1	2016
5.	Asphalt Mixing Plant Mini	Freddy Mix	1	2004
6.	Asphalt Mixing Plant	Speco	1	2015
7.	Asphalt Finisher	Vogele	1	2016
8.	Mesin Gilas	Scheid, Barata, Bomag, HAMM, Atlas Copco	39	1974.1975.1991.2012.2013. 2014.2015.2016
9.	Mesin Gilas 1 Ton	GTO, Baby Roller	2	2008.2014
10.	Mesin Gilas 4 Ton	Grace, Barata	2	1980.2007
11.	Stamper	Mikasa MTR. 80 H, Tiger	8	1986.2010
12.	Mesin Gilas 2.5-4 Ton	Lister	1	1992.1995.2004.2008.2007
13.	Vibration Plate	Robin, Wracker	5	1991.1992

No	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	Jumlah	Tahun Pembelian
14.	Concrete Mixer	Dragon Globe,Cakra, Tiga Berlian	6	2003.2013
15.	Loader	JCB, Barata	2	1987.1989
16.	Loader / Bachoe	IMF,Extradig / GEHL	3	1989.2001.2008
17.	Mobil Crane	Isuzu	1	2008
18.	Forklift	Mitsubishi	1	1994
19.	Compressor	Atlas,Sulivan Palatek	2	1992.2003
20.	Generating Set	Peter	1	1988
21.	Pompa Air	Honda, EBARA, Isuzu	4	1987.1988.1992
22.	Floating Pump		1	2014
23.	Asphalt Sprayer	Anugrah	2	1984.1989
24.	Asphalt Breaker	Atlas Copco		1987.1988
25.	Concrete Vibrator	Mikasa	2	1988
26.	Circular Saw	Wracker	2	1989
27.	Stamper Plate	Honda	3	2013
28.	Carrier Truck	Isuzu	1	2013
29.	Power Pack	Atlas Copco	1	2013
30.	Mesin Pengebor Sumur Resapan	Little Beaver	2	2015.2016
31.	Pompa Water Jet	US Jetting	2	2015.2016
32.	Generator Tower Light		2	2014.2015
33.	Cold Mixing	Writgen Jerman	1	2015
34.	Truck Tangki	Hino	1	2016
35.	Mesin Bor	First	1	
36.	Compressor Angin	Swan	1	

No	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	Jumlah	Tahun Pembelian
20.	Mesin Las Listrik	Yanmar	1	1996
21.	AC Welding Transforer	Roxton	1	2006
	Takel	Shung Yan, Vital	2	2003.2013
22.	Treker		1	2005
23.	Kunci Pembuka Baut	Diamond, Dowidat, Fukung, Sands	3	2003.2005.2013
	Kunci Sok Lengkap	Diamond, Sands	2	2003.2013
24.	Gurinda Duduk		1	2003
	Gurinda Tangan	Hitachi	1	2013
25.	Dongkrak Hidrolik	Japan	1	2003
26.	Mata Bor Baja	Japan	1	2003
27.	Mesin Gergaji	Kingrex	1	2003
	Bor Listrik Tangan	Bosch	1	2003

Sumber : UPT Peralatan Perbengkelan, 2018

Berdasarkan kepemilikan dan jenis peralatan berat yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dikaitkan dengan tantangan yang dihadapi tahun-tahun berikut dengan target pelayanan dan target program yang tinggi, maka diperlukan penambahan jumlah peralatan modern dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Diantaranya *stamper*, truk *crane*, mobil pompa dan penyedot air.

## 1.2 TUGAS DAN FUNGSI OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung mempunyai tugas dan kewajiban membantu Wali Kota dalam melaksanakan sebagian Kewenangan Daerah Bidang

Pekerjaan Umum Lingkup Kebinamargaan dan Sumber Daya Air. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijaksanaan teknik kebinamargaan dan sumber daya air;
- b. Melaksanakan tugas teknik operasional kebinamargaan dan sumber daya air yang meliputi perencanaan, pengendalian operasional, pembangunan dan pemeliharaan kebinamargaan dan sumber daya air;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas operasional kebinamargaan dan sumber daya air;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai bidang tugasnya.

Bidang kewenangan yang menjadi garapan Dinas Pekerjaan Umum adalah Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi jalan umum berikut bangunan pelengkapannya; jembatan, saluran drainase jalan dan trotoar, infrastruktur sungai termasuk bangunan pelengkapannya; bendung, bangunan pembagi, *pump house*, situ, seke, kolam retensi, jalan inspeksi, dan penerangan jalan umum.

### **1.3 ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI OPD**

Berdasarkan hasil *review* terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan OPD berdasarkan :

- i. Gambaran pelayanan OPD;
- ii. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
- iii. Sasaran jangka menengah dari Renstra Provinsi/Kota; dan
- iv. Implikasi RTRW bagi pelayanan OPD,

maka ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas struktur, pola pemeliharaan dan tingkat pelayanan jalan;
2. Peningkatan kualitas dan pola pemeliharaan sistem drainase kota;

3. Penentuan skala prioritas dan dukungan anggaran pembangunan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Pusat Primer Kedua di Bandung Timur;
4. Peningkatan ketersediaan dan kualitas penerangan jalan dengan memanfaatkan lampu hemat energi dan tahan lama;
5. Menjaga integritas sungai dari perubahan fisik (lebar, kedalaman, warna), perubahan biologis, perubahan kimia dan debit air dengan menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan;
6. Perbaikan dan peningkatan penyelenggaraan infrastruktur kebinamargaan, pengairan dan penerangan jalan umum mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

#### **1.4 SISTEMATIKA**

Adapun sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung adalah sebagai berikut:

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Pada bagian ini akan dibahas tentang gambaran umum Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung, tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung, isu – isu strategis yang dihadapi, serta sistematika pembahasan yang akan menguraikan keseluruhan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018.

#### **BAB 2 PERENCANAAN KINERJA**

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung sebelum dan sesudah reviu.

### **BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA**

Berisi capaian Indikator Kinerja Utama, pengukuran, evaluasi, dan analisa capaian kinerja, akuntabilitas keuangan, serta prestasi dan penghargaan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung tahun 2018.

### **BAB 4 PENUTUP**

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan ringkasan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), serta gambaran kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung tahun 2018.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2018 ini, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **2.1. PERENCANAAN STRATEGIS**

##### **2.1.1. Rencana Strategis**

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2013-2018 ditetapkan dengan Surat Keputusan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung Tahun 2013-2018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Wali Kota terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018. Di samping itu pula, Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian



Pekerjaan Umum, Bappenas dan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional.

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum OPD, sehingga Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

## 1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera, “Bandung Juara”.

Visi Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung Tahun 2013-2018 adalah :

**Terwujudnya Infrastruktur Kebinamargaan, Pengairan, dan  
Penerangan Jalan Umum Yang Unggul, Nyaman dan Andal Untuk Kota  
Bandung Yang Bermartabat.**

## **2. Misi**

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung Tahun 2013-2018 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah kota dan mobilitas warga kota;
- b. Membangun jalan, trotoar dan drainase jalan kota dengan struktur yang berkualitas dan menjamin keselamatan pengguna jalan;
- c. Menata sungai sebagai sistem drainase alami pengendali banjir dan bagian muka pembangunan kota (*river-front city*);
- d. Mengembangkan sistem penerangan jalan umum kota yang hemat energi, ramah lingkungan dan berestetika;
- e. Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pelayanan OPD Dinas Pekerjaan Umum.

## **3. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategik. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Bandung Tahun 2013-2018 sebanyak 5 (lima) sasaran strategis yang mengalami perubahan Tahun 2017 menjadi 4(empat) sasaran strategis berikut dengan indikator kinerja.

Untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung seperti yang tercantum pada tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung Tahun 2018.

**Tabel 2.1**

**Sasaran, Tujuan dan Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung Tahun 2018**

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>SASARAN Setelah Reviu</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA Setelah Reviu</b>
1. Mempercepat pembangunan infrastruktur pada pusat kegiatan kota prioritas sesuai tata ruang kota	1. Terwujudnya pembangunan infrastruktur jalan di PPK	-	1. Tingkat minimal keterbangunan Infrastruktur Jalan di PPK	-
2. Membangun infrastruktur jalan, trotoar dan drainase jalan kota dengan struktur yang baik dan umur pakai panjang	2. Terwujudnya Infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata	1. Terwujudnya Infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata	2. Rasio minimal ruas jalan dalam kondisi baik	1. Rasio minimal ruas jalan dalam kondisi baik
			3. Indeks aksesibilitas jalan	2. Tingkat deviasi maksimal pemerataan pemeliharaan jalan
			4. Tingkat deviasi maksimal pemerataan pemeliharaan jalan	
3. Meningkatkan penyediaan pelayanan penerangan jalan umum di wilayah kota secara merata	3. Terwujudnya Bandung Caang Baranang	2. Terwujudnya Bandung Caang Baranang	5. Persentase minimal jumlah PJU terbangun yang berfungsi baik	3. Persentase minimal jumlah PJU terbangun yang berfungsi baik
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur drainase	4. Terselesaikannya permasalahan banjir di Kota Bandung	3. Terselesaikannya permasalahan banjir di Kota Bandung	6. Presentase minimal saluran drainase yang berfungsi dengan baik	4. Presentase minimal saluran drainase yang berfungsi dengan baik

TUJUAN	SASARAN	SASARAN Setelah Reviu	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA Setelah Reviu
dan penataan sungai untuk pengendalian banjir			7. Presentase minimal penanganan rutin banjir kurang dari 2 jam	5. Presentase minimal penanganan rutin banjir kurang dari 2 jam
			8. Presentase minimal banjir terselesaikan	6. Presentase minimal banjir terselesaikan
5. Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pelayanan OPD yang bersih dan efektif	5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik yang Prima	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik yang Prima	9. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	7. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2018

### **C. Strategi dan Arah Kebijakan**

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran. Adapun penjelasan lebih rinci kebijakan dan program untuk pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

**Sasaran 1** Terwujudnya infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata

#### ***Kebijakan:***

- (1) Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- (2) Pembangunan jalan baru dan pembangunan *flyover* di titik rawan macet;
- (3) Pembangunan trotoar di semua ruas jalan;
- (4) Pembangunan trotoar, ruang tunggu terminal serta bangunan publik yang dilengkapi dengan fasilitas bagi difabel.

Sasaran tersebut dilaksanakan melalui Bidang Pembangunan dan Pengendalian, Bidang Pemeliharaan dan Pengendalian, UPT 6 Wilayah, UPT Produksi Campuran Aspal dengan program:

- (1) Program Perencanaan Pekerjaan Umum;

- (2) Program Pembangunan Pekerjaan Umum;
- (3) Program Pemeliharaan Pekerjaan Umum.

**Sasaran 2** Terwujudnya Bandung Caang Baranang

**Kebijakan:**

- (1) Penyediaan PJU dan PJU Lingkungan dengan Lampu LED (*Light Emitting Diode*);
- (2) Mengembangkan *Smart Monitoring System*.

Sasaran tersebut dilaksanakan melalui Bidang Pembangunan dan Pengendalian, Bidang Pemeliharaan dan Pengendalian dengan program:

- (1) Program Perencanaan Pekerjaan Umum;
- (2) Program Pembangunan Pekerjaan Umum;
- (3) Program Pemeliharaan Pekerjaan Umum.

**Sasaran 3** terselesaikannya permasalahan banjir di Kota Bandung

**Kebijakan:**

- (1) Pembangunan dan rehabilitasi saluran/drainase dan gorong-gorong;
- (2) Mengembangkan prasarana pengendali banjir dengan mengedepankan konsep *eco-drain*;
- (3) Mengembangkan dan memelihara bantaran tanggul sungai;
- (4) Normalisasi sungai dan menata lingkungan sempadan sungai;
- (5) Pengembangan sungai yang hijau, bersih, memiliki kapasitas pengairan yang memadai dan menjadi ruang publik yang nyaman;
- (6) Memfungsikan kembali *brandgang* pada kawasan pemukiman;
- (7) Pengendalian kawasan-kawasan yang berfungsi sebagai kawasan lindung;
- (8) Normalisasi saluran sungai serta pembangunan kembali kawasan Cikapundung Timur.

Sasaran tersebut dilaksanakan melalui Bidang Pembangunan dan Pengendalian, Bidang Pemeliharaan dan Pengendalian dengan program:

- (1) Program Perencanaan Pekerjaan Umum;
- (2) Program Pembangunan Pekerjaan Umum;
- (3) Program Pemeliharaan Pekerjaan Umum.

**Sasaran 4** Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik yang prima.

***Kebijakan:***

- (1) Penyediaan cadangan bahan material perbaikan jalan sebagai antisipasi perubahan kondisi jalan secara tiba-tiba;
- (2) Pembentukan unit reaksi cepat perbaikan jalan;
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur dengan melibatkan pemangku kepentingan (masyarakat, perguruan tinggi);
- (4) Pengawasan terhadap pelayanan administrasi perkantoran secara reguler;
- (5) Pengadaan peralatan kerja secara efisien dan efektif;
- (6) Pemantapan koordinasi perencanaan, pemrograman, monitoring dan evaluasi;
- (7) Pengadaan sarana dan prasarana kebinamargaan sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan dan standar teknologi yang mutakhir.

Sasaran tersebut dilaksanakan melalui Sekretariat, Bidang Perencanaan, UPT 6 Wilayah, UPT Pengujian Bahan dan Konstruksi, UPT Alat Berat, UPT Daerah Aliran Sungai, dengan program:

- (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- (3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- (4) Program Perencanaan Pekerjaan Umum;
- (5) Program Pembangunan Pekerjaan Umum;

(6) Program Pemeliharaan Pekerjaan Umum.

### **2.1.2. Indikator Kinerja Utama**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Nomor : 620/165-DPU/2015 Tanggal 3 Maret 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung Tahun 2013 – 2018. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Organisasi Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung Tahun 2018 adalah sebagai berikut :



**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung**  
**Tahun 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	SASARAN Setelah Reviu	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	INDIKATOR KINERJA Setelah Reviu	SATUAN
1	Terwujudnya pembangunan infrastruktur jalan di PPK	-	Tingkat minimal Keterbangunan Infrastruktur Jalan PPK Gedebage	Persen	-	-
2	Terwujudnya infrastruktur jalan yang berkualitas, dan merata	Terwujudnya infrastruktur jalan yang berkualitas, dan merata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio minimal ruas Jalan dalam kondisi baik</li> <li>• Indeks aksesibilitas jalan</li> <li>• Tingkat deviasi maksimal pemerataan pemeliharaan jalan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persen</li> <li>• Skala</li> <li>• Persen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio minimal ruas Jalan dalam kondisi baik</li> <li>• Tingkat deviasi maksimal pemerataan pemeliharaan jalan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persen</li> <li>• Persen</li> </ul>
3	Terwujudnya Bandung Caang Baranang	Terwujudnya Bandung Caang Baranang	Presentase minimal jumlah PJU terbangun yang berfungsi baik	Persen	Presentase minimal jumlah PJU terbangun yang berfungsi baik	Persen

NO	SASARAN STRATEGIS	SASARAN Setelah Reviu	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	INDIKATOR KINERJA Setelah Reviu	SATUAN
4	Terselesaikannya Permasalahan Banjir di Kota Bandung	Terselesaikannya Permasalahan Banjir di Kota Bandung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase minimal saluran drainase yang berfungsi dengan baik</li> <li>• Presentase minimal penanganan rutin banjir kurang dari 2 jam</li> <li>• Presentase minimal banjir terselesaikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persen</li> <li>• Persen</li> <li>• Persen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase minimal saluran drainase yang berfungsi dengan baik</li> <li>• Presentase minimal penanganan rutin banjir kurang dari 2 jam</li> <li>• Presentase minimal banjir terselesaikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persen</li> <li>• Persen</li> <li>• Persen</li> </ul>
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai

Sumber : Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2018

#### **D. Perjanjian Kinerja 2018**

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung Tahun 2018 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung Tahun 2013-2018, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung**  
**Tahun 2018**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
1	Terwujudnya pembangunan infrastruktur jalan di PPK	Tingkat minimal keterbangunan Infrastruktur Jalan PPK Gedebage	persentase	-
2	Terwujudnya infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata	• Rasio minimal ruas jalan dalam kondisi baik	persentase	100
		• Indeks Aksesibilitas	skala	-
		• Tingkat deviasi maksimal pemerataan pemeliharaan jalan	persentase	20
3	Terwujudnya Bandung Caang Baranang	Persentase minimal jumlah PJU terbangun yang berfungsi baik	persentase	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
4	Terselesainya Permasalahan Banjir di Kota Bandung	• Presentase minimal saluran drainase yang berfungsi dengan baik	persentase	100
		• Presentase minimal penanganan rutin banjir kurang dari 2 jam	persentase	100
		• Presentase minimal banjir terselesaikan	persentase	100
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	nilai	85

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Tahun, 2018

Sedangkan untuk rencana penganggaran untuk menunjang pencapaian Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja akan disampaikan pada tabel 2.4 Perencanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung Tahun 2018.

**Tabel 2.4**  
**Perencanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung**  
**Tahun 2018**

NO	SASARAN	PROGRAM	NILAI (Rp.)
1	Terwujudnya pembangunan infrastruktur jalan di PPK	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	-
2	Terwujudnya infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata	Program Perencanaan Pekerjaan Umum; Program Pembangunan Pekerjaan Umum, Program Pemeliharaan Pekerjaan Umum.	237.783.122.644,00
		Program Pemeliharaan Pekerjaan Umum.	20.156.511.212,00
3	Terwujudnya Bandung Caang Baranang	Program Perencanaan Pekerjaan Umum; Program Pembangunan Pekerjaan Umum, Program	107.206.403.405,98

NO	SASARAN	PROGRAM	NILAI (Rp.)
		Pemeliharaan Pekerjaan Umum.	
4	Terselesaikannya Permasalahan Banjir di Kota Bandung	Program Perencanaan Pekerjaan Umum; Program Pembangunan Pekerjaan Umum, Program Pemeliharaan Pekerjaan Umum.	56.652.784.289,00
		Program Perencanaan Pekerjaan Umum; Program Pembangunan Pekerjaan Umum, Program Pemeliharaan Pekerjaan Umum.	94.971.499.397,50
		Program Pemeliharaan Pekerjaan Umum.	8.043.651.371,00
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik yang Prima	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; Program Peningkatan Disiplin Aparatur;	16.869.972.207,00

Sumber Data : DPA Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2018

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung.

**Tabel 3.1  
Predikat nilai capaian kinerja**

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1.	> 100 %	Melebihi/ Melampaui Target
2.	=100 %	Sesuai Target
3.	< 100 %	Tidak Mencapai Target

### **3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum kota Bandung Nomor : 620/165-DPU/2015 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung Tahun 2013 - 2018. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung Tahun 2018 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung**  
**Tahun 2018**

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Tingkat minimal keterbangunan infrastruktur jalan di PPK Gedebage	%	-	-	-
2	Rasio minimal ruas Jalan dalam kondisi baik	%	100	100	100
3	Indeks aksesibilitas jalan	skala	-	-	-
4	Tingkat deviasi maksimal pemerataan pemeliharaan jalan	%	20	15,84	120,82
5	Persentase minimal jumlah PJU terbangun yang berfungsi baik	%	100	100	100
6	Persentase minimal saluran drainase yang berfungsi dengan baik	%	100	100	100
7	Persentase minimal penanganan rutin banjir kurang dari 2 jam	%	100	100	100
8	Persentase minimal banjir terselesaikan	%	100	100	100
9	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	nilai	85	85,11	100,13
<b>Rata-Rata Capaian IKU</b>					<b>102,99</b>

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung, 2018

Berdasarkan hasil pengukuran IKU di dapat hasil rata-rata capaian IKU sebesar 102,99 %, capaian tersebut diperoleh dari 2 (Dua) indikator yang

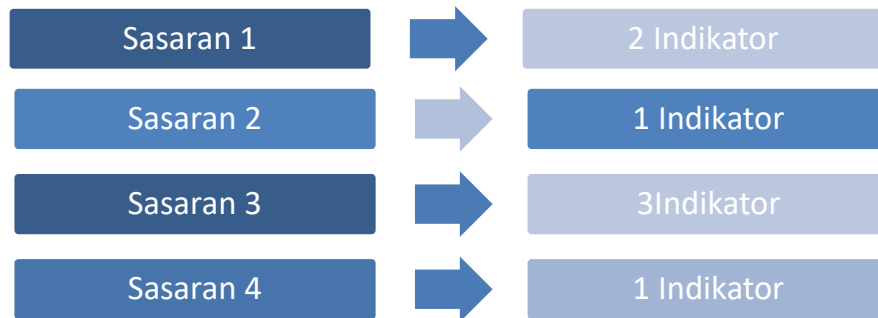


melebihi target ( $\geq 100\%$ ), yaitu tingkat deviasi maksimal pemerataan pemeliharaan jalan dengan capaian 120,82 % dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian 100,13 %. 5 (Lima) indikator yang mencapai target (= 100%) yaitu rasio minimal ruas jalan dalam kondisi baik; persentase minimal jumlah PJU terbangun yang berfungsi baik; persentase minimal saluran drainase yang berfungsi dengan baik; persentase minimal penanganan rutin banjir kurang dari 2 jam; persentase minimal banjir terselesaikan dengan capaian 100 %.

### **3.2 PENGUKURAN, EVALUASI, DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BANDUNG TAHUN 2018**

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dan dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2018.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung Tahun 2018 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung hasil reviu berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum tentang IKU Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung yang menetapkan 4 (empat) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja (*outcome* dan *output* penting) sebagaimana disajikan pada Gambar 3.1 berikut :



Pengukuran masing-masing kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung tahun 2018 akan dibahas lebih rinci pada subbab 3.2.1 sampai dengan subbab 3.2.8.

### 3.2.1 Pengukuran, Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran 1 :

#### ***Terwujudnya Infrastruktur Jalan yang Berkualitas dan Merata***

Pengukuran kinerja untuk pencapaian sasaran 1 : Terwujudnya infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata, dilakukan dengan menggunakan 2 indikator kinerja sasaran, sebagaimana pada tabel 3.3.

**Tabel 3.3**  
**Sasaran, Indikator, serta Formulasi Perhitungan**  
**Sasaran 1**

No	Sasaran	Indikator kinerja	Formulasi/ rumus perhitungan
1	Terwujudnya infrastruktur jalan yang berkualitas, dan merata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio minimal ruas Jalan dalam kondisi baik</li> <li>• Tingkat deviasi maksimal pemerataan pemeliharaan jalan</li> </ul>	$\frac{\text{Panjang jalan} - \text{Jalan kondisi rusak}}{\text{Panjang jalan Kota Bandung}} \times 100\%$ $\frac{\text{Porsi tertinggi-rata-rata}}{\text{Rata-rata}} \times 100\%$

Realisasi pencapaian sasaran terwujudnya infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata sebagaimana telah direncanakan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Pencapaian Indikator Sasaran : Terwujudnya infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata Tahun 2018**

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2017		Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rasio minimal ruas Jalan dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100
2	Tingkat deviasi maksimal pemerataan pemeliharaan jalan	%	20	13,64	20	15,84	120,82
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>							<b>110,41</b>

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Capaian kinerja Tahun 2018 untuk ruas jalan kota dalam kondisi baik tercapai 100%. Capaian realisasi didapat dari kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan sepanjang 142.313,85 m ditambah panjang jalan dalam kondisi baik sampai dengan awal 2018 adalah 1.030.468,02 m atau 1.030,47 km dibagi total jalan kewenangan kota Bandung sepanjang 1.172,78 km. Rasio minimal ruas Jalan dalam kondisi baik Tahun 2018 sudah mencapai 100% target Renstra.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap **Sasaran Pertama** yaitu **‘Terwujudnya infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata’**, dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

● **Indikator Kinerja Utama 1 :**

Rasio minimal ruas jalan dalam kondisi baik diperoleh dari rumus perhitungan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Panjang jalan} - \text{Jalan kondisi rusak}}{\text{Panjang jalan Kota Bandung}} \times 100\%$$

$$= \frac{1.172,78 - 0}{1.172,78} \times 100\%$$

$$= 100 \%$$

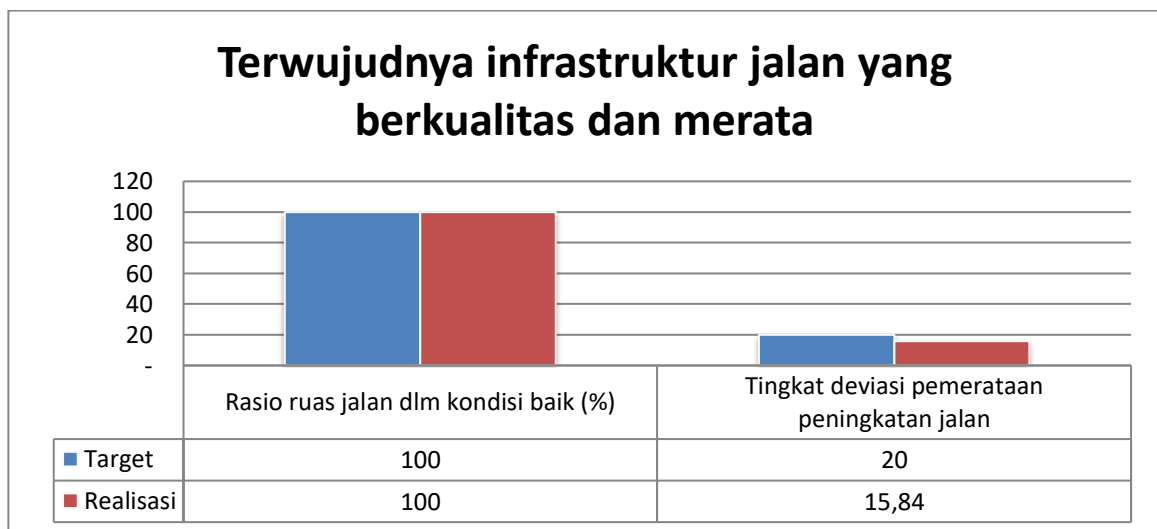
Capaian kinerja Tahun 2018 sebesar 100 % dari target 100 % atau capaian 100 % ruas jalan kota dalam kondisi baik. Realisasi 100 % melampaui target capaian. Capaian realisasi ini didapat dari kegiatan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan sepanjang 142.313,85 m ditambah panjang jalan dalam kondisi baik sampai dengan awal 2018 adalah 1.030.468,02 m atau 1.030,47 km dibagi total jalan kewenangan Kota Bandung sepanjang 1.172,78 km. Rasio minimal ruas Jalan dalam kondisi baik pada tahun 2018 adalah 100% dari 100% target Renstra di Tahun 2018.

Sehingga dapat dikatakan bahwa Rasio Minimal Ruas Jalan dalam Kondisi Baik setiap tahunnya mengalami peningkatan dan telah mencapai target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung.





**Dokumentasi Pekerjaan Jalan Tahun 2018**



● **Indikator Kinerja Utama 2 :**

Tingkat deviasi maksimal pemerataan pemeliharaan jalan diperoleh dari rumus perhitungan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Porsi tertinggi-rata-rata}}{\text{Rata-rata}} \times 100\%$$

$$= \frac{3.141.371.767,00 - 2.711.923.214,83}{2.711.923.214,83} \times 100\%$$

$$= 15,84 \%$$

Realisasi 15,84 % melampaui target (20%), didapat dari pembagian anggaran yang dipergunakan oleh UPT untuk melaksanakan pemeliharaan rutin. Total anggaran untuk 6 UPT Rp. 16.271.539.289,00 dengan rata-rata sebesar Rp. 2.711.923.214,83 (Nilai anggaran terbesar Rp. 3.141.371.767,00 dikurang nilai rata-rata Rp. 2.711.923.214,83) dibagi nilai rata-rata Rp. 2.711.923.214,83) dikali 100.

Sedangkan pada tahun 2018 telah diperoleh capaian sebagai berikut:

1. Realisasi anggaran tertinggi (UPT. Cibeunying) sebesar Rp. 3.141.371.767,00
2. Rata-rata realiasi anggaran 6 UPT sebesar Rp. 2.711.923.214,83.

Sehingga capaian tingkat deviasi maksimal pemerataan pemeliharaan jalan sebesar 15,84% (melampaui target tahun 2018).

Capaian tingkat deviasi maksimal pemerataan pemeliharaan jalan setiap tahunnya selalu melampaui target dan telah melebihi target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung.

Untuk tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung akan melaksanakan program/kegiatan sebagai berikut:

1. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Drainase Jalan, dengan Indikator Kinerja 'Panjang jalan dalam kondisi baik' dengan target capaian sepanjang 150.000 m.
2. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Drainase Jalan, dengan Indikator Kinerja 'Panjang jalan dalam kondisi baik' dengan capaian target sebesar 153.542,05 m.

### 3.2.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2 : Terwujudnya Bandung Caang Baranang

Pengukuran kinerja untuk pencapaian sasaran 2 : Terwujudnya Bandung Caang Baranang, dilakukan dengan menggunakan 1 indikator kinerja sasaran, sebagaimana pada tabel 3.5.

**Tabel 3.5**  
**Sasaran, Indikator, serta Formulasi Perhitungan**  
**Sasaran 2**

No	Sasaran	Indikator kinerja	Formulasi/ rumus perhitungan
1	Terwujudnya Bandung Caang Baranang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presentase minimal jumlah PJU terbangun yang berfungsi baik</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah PJU} - \text{Jumlah PJU padam}}{\text{Jumlah PJU}} \times 100\%$

Realisasi pencapaian sasaran Terwujudnya Bandung Caang Baranang tahun 2018 sebagaimana telah direncanakan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
**Pencapaian Indikator Sasaran : Terwujudnya Bandung Caang Baranang Tahun 2018**

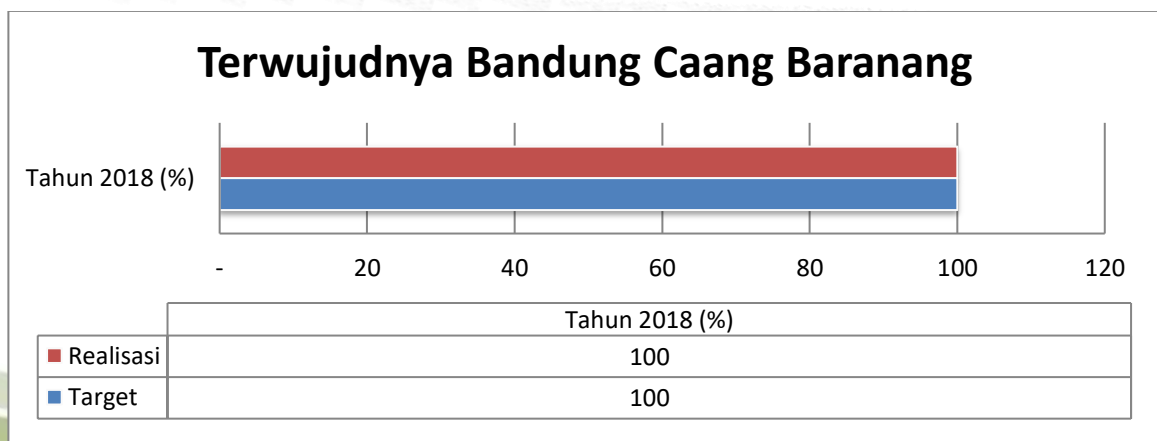
No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2017		Tahun 2018		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase minimal jumlah PJU terbangun	%	100	100	100	100	100

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2017		Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	yang berfungsi baik						
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>							<b>100</b>

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi pada Tahun 2018 menunjukkan capaian kinerja sebesar 100 %.



*Dokumentasi Pekerjaan PJU Tahun 2018*





Pada **Sasaran kedua** yaitu 'Terwujudnya Bandung Caang Baranang', dapat dilihat dari indikator Presentase minimal jumlah PJU yang terbangun yang berfungsi baik, yang mencapai target capaian.

• **Indikator Kinerja Utama 3:**

Presentase minimal jumlah PJU terbangun yang berfungsi baik diperoleh dari rumus perhitungan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah PJU} - \text{Jumlah PJU padam}}{\text{Jumlah PJU}} \times 100\%$$

$$= \frac{42.845 - 0}{42.845} \times 100\%$$

$$= 100 \%$$

Realisasi 100 % telah mencapai target 2018 (100%), didapat dari total PJU terbangun s/d tahun 2018 adalah 42.845 titik dikurangi jumlah PJU padam sebanyak 0 titik, (dibagi jumlah PJU yang telah terbangun di Kota Bandung (42.845 titik) dikali seratus persen.

Pada tahun 2018 realisasi mencapai target (100%), dikarenakan dukungan dari kinerja URC PJU yang responsive terhadap kondisi pju terpasang serta terhadap aspirasi masyarakat yang berisi keluhan pju padam. Peningkatan kinerja ini didukung oleh penambahan tim URC serta dukungan peralatan baik kelistrikan serta kendaraan lapangan berupa crane yang jumlahnya 7 unit.

Capaian indikator presentase minimal jumlah PJU terbangun yang berfungsi baik mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga dapat mencapai target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung.

Untuk tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung akan melaksanakan program/ kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan PJU, dengan indikator kinerja 'Terbangunnya PJU' dengan target capaian sebanyak 2.300 titik, melalui pembangunan PJU dan PJJ

serta revitalisasi pju ke dalam model standar dengan penambahan titik-titik baru;

2. Pemeliharaan PJU, dengan indikator kinerja ‘Terpeliharanya PJU’ dengan target capaian sebanyak 1.500 titik, melalui kegiatan pemeliharaan lampu padam dengan penggantian swakelola oleh Tim URC PJU serta peningkatan/rehabilitasi kondisi PJU jenis konvensional ke LED, sesuai apa yang tercantum dalam RPJM Kota Bandung, melalui sasaran pembangunan yang telah ditetapkan untuk menggunakan lampu penerangan berjenis LED yang hemat energy dan ramah lingkungan.

### 3.2.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 3 : *Terselesaikannya Permasalahan Banjir di Kota Bandung*

Pengukuran kinerja untuk pencapaian sasaran 3: Terselesaikannya Permasalahan Banjir di Kota Bandung, dilakukan dengan menggunakan 3 indikator kinerja sasaran, sebagaimana pada tabel 3.7.

**Tabel 3.7**  
**Sasaran, Indikator, serta Formulasi Perhitungan**  
**Sasaran 3**

No	Sasaran	Indikator kinerja	Formulasi/ rumus perhitungan
1	Terselesaikannya Permasalahan Banjir di Kota Bandung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase minimal saluran drainase yang berfungsi dengan baik</li> <li>• Presentase minimal penanganan rutin banjir kurang dari 2 jam</li> </ul>	$\frac{\text{Panjang jaringan drainase} - \text{Panjang drainase yang tidak berfungsi baik}}{\text{Panjang Jaringan drainase}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah lokasi banjir yang tertangani kurang dari 2 jam}}{\text{Jumlah lokasi banjir}} \times 100\%$

No	Sasaran	Indikator kinerja	Formulasi/ rumus perhitungan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Presentase minimal banjir terselesaikan</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah lokasi banjir terselesaikan}}{\text{Jumlah lokasi banjir}} \times 100\%$

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Tahun 2018

Realisasi pencapaian sasaran Terselesaikannya Permasalahan Banjir di Kota Bandung sebagaimana telah direncanakan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.8**  
**Pencapaian Indikator Sasaran : Terselesaikannya Permasalahan Banjir di Kota Bandung Tahun 2018**

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2017		Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase minimal saluran drainase yang berfungsi dengan baik	%	100	100	100	100	100
2	Persentase minimal penanganan rutin banjir kurang dari 2 jam	%	100	97,06	100	100	100

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2017		Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
3	Presentase minimal banjir terselesaikan	%	100	90	100	100	100
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>				<b>95,69</b>			<b>100</b>

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi pada Tahun 2018 menunjukkan capaian kinerja 100 % yang berarti telah mencapai target Renstra. Dengan perhitungan capaian sebagai berikut :

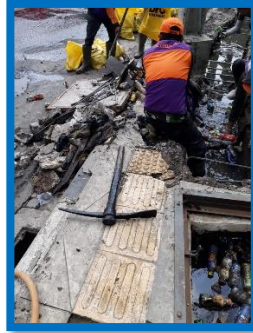
• **Indikator Kinerja Utama 4:**

Persentase minimal saluran drainase yang berfungsi dengan baik diperoleh dari rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Panjang jaringan drainase} - \text{Panjang drainase yang tidak berfungsi baik}}{\text{Panjang Jaringan drainase}} \times 100\% \\
 &= \frac{524.114 - 0}{524.114} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Realisasi 100 % telah mencapai target tahun 2018 (100%), panjang kondisi drainase yang berfungsi baik sampai dengan tahun 2018 didapat dari kegiatan pembangunan saluran drainase (13.930,69 m) ditambah panjang drainase yang dipelihara (392.884,02 m) ditambah panjang drainase dalam kondisi baik di Kota Bandung (510.183,39 m) yaitu sebesar 524.114 m, dan semua drainase berfungsi sehingga total panjang drainase di Kota Bandung 524.114 m dikurangi drainase yang tidak berfungsi 0 m dibagi 524.114 m dikali 100% sehingga capaiannya sebesar 100 %.

Pencapaian persentase minimal saluran drainase yang berfungsi dengan baik telah memenuhi target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung.



### ***Dokumentasi Pekerjaan Saluran 2018***

#### **• Indikator Kinerja Utama 5:**

Presentase minimal penanganan rutin banjir kurang dari 2 jam diperoleh dari rumus perhitungan sebagai berikut :

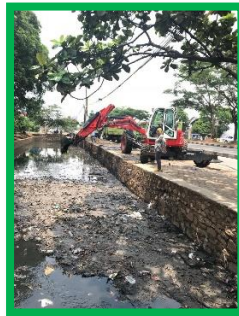
$$= \frac{\text{Jumlah lokasi banjir yang tertangani kurang dari 2 jam}}{\text{Jumlah lokasi banjir}} \times 100\%$$

$$= \frac{68}{68} \times 100\%$$

$$= 100 \%$$

Realisasi 100 % telah mencapai target (100%), total titik banjir yang ditangani kurang dari 2 jam (68 titik kumulatif) dibagi total titik banjir di Kota Bandung 68 titik dikali 100 menjadi 100 %, (titik banjir tertangani terlampir).

Sedangkan capaian tahun 2017 sebesar 97,06 % tidak mencapai target (100%), total titik banjir yang ditangani kurang dari 2 jam (66 titik kumulatif) dibagi total titik banjir di Kota Bandung 68 titik dikali 100 menjadi 97,06 %.



### ***Dokumentasi Pekerjaan Pengairan 2018***

Dapat dikatakan bahwa capaian indikator presentase minimal penanganan banjir kurang dari 2 jam setiap tahunnya mengalami peningkatan, akan tetapi belum memenuhi target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung.

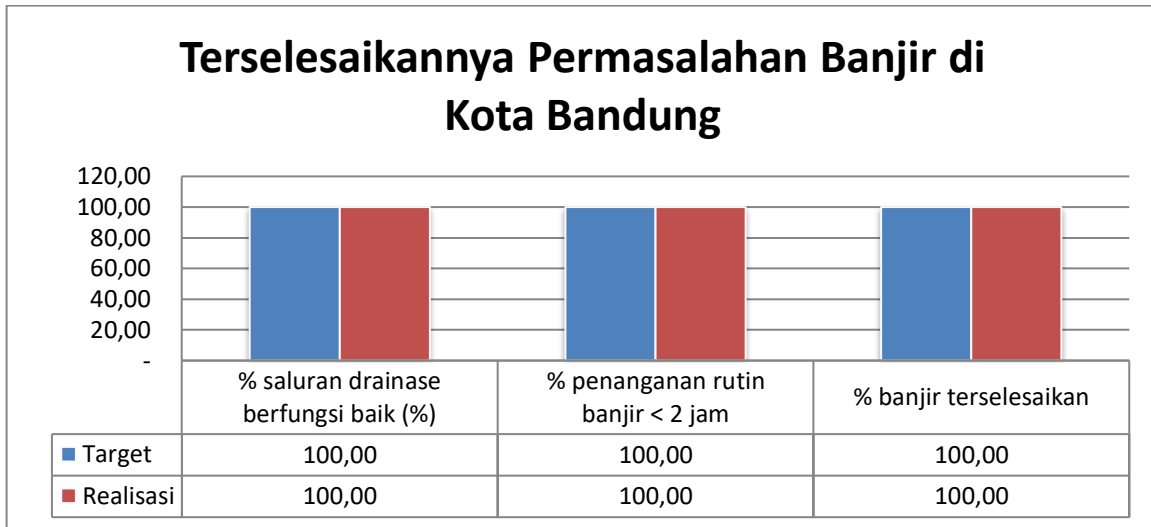
- **Indikator Kinerja Utama 6:**

Presentase minimal banjir terselesaikan diperoleh dari rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah lokasi banjir terselesaikan}}{\text{Jumlah lokasi banjir}} \times 100\% \\
 &= \frac{10}{10} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Realisasi 100% telah mencapai target (100%), capaian tersebut didapat dari pelaksanaan pembangunan rumah pompa sebanyak 7 buah yang dapat menyelesaikan 10 titik banjir Kota Bandung dari 10 titik banjir melebihi 2 jam yang harus diselesaikan, sehingga 100% didapat dari 10 titik banjir terselesaikan, dibagi 10 titik banjir lebih dari 2 jam eksisting.

Sedangkan pada tahun 2017 realisasi sebesar 90 % tidak mencapai target (100%), capaian tersebut didapat dari pelaksanaan pembangunan rumah pompa sebanyak 6 buah yang dapat menyelesaikan 9 titik banjir Kota Bandung dari 10 titik banjir yang harus diselesaikan, sehingga 90 % didapat dari 9 titik banjir terselesaikan dibagi 10 titik banjir eksisting. Karena pada tahun 2016 Indikator kinerja minimal banjir terselesaikan mengalami perubahan formulasi, dimana pada tahun 2015 jumlah titik banjir yang terselesaikan dibagi 68 titik banjir di Kota Bandung, sedangkan pada tahun 2016 jumlah titik banjir yang terselesaikan dibagi jumlah 10 titik banjir yang genangannya lebih dari 2 jam.



Untuk tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung akan melaksanakan program/ kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan Saluran Drainase Jalan dan Trotoar melalui Indikator Kinerja 'Panjang saluran drainase jalan terbangun' dengan target capaian sepanjang 2.500 m;
2. Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air melalui indikator kinerja Jumlah kolam retensi terbangun dan jumlah rumah pompa terbangun' dengan target capaian 1 buah dan 3 unit;
3. Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase jalan 6 SWK dengan target capaian sepanjang 18.000 m;
4. Rehabilitasi/Pemeliharaan Daerah Aliran Sungai dengan target capaian 50.000 m.

#### **3.2.4 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 4 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik yang Prima**

Pengukuran kinerja untuk pencapaian sasaran 5: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik yang Prima, dilakukan dengan menggunakan 1 indikator kinerja sasaran, sebagaimana pada Tabel 3.9.



**Tabel 3.9**  
**Sasaran, Indikator, serta Formulasi Perhitungan**  
**Sasaran 5**

No	Sasaran	Indikator kinerja	Formulasi/ rumus perhitungan
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik yang Prima	• Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sesuai dengan SK Menpan No. 16 Tahun 2014 tentang Survey Kepuasan Masyarakat

Realisasi pencapaian sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik yang Prima sebagaimana telah direncanakan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung adalah sebagai berikut:

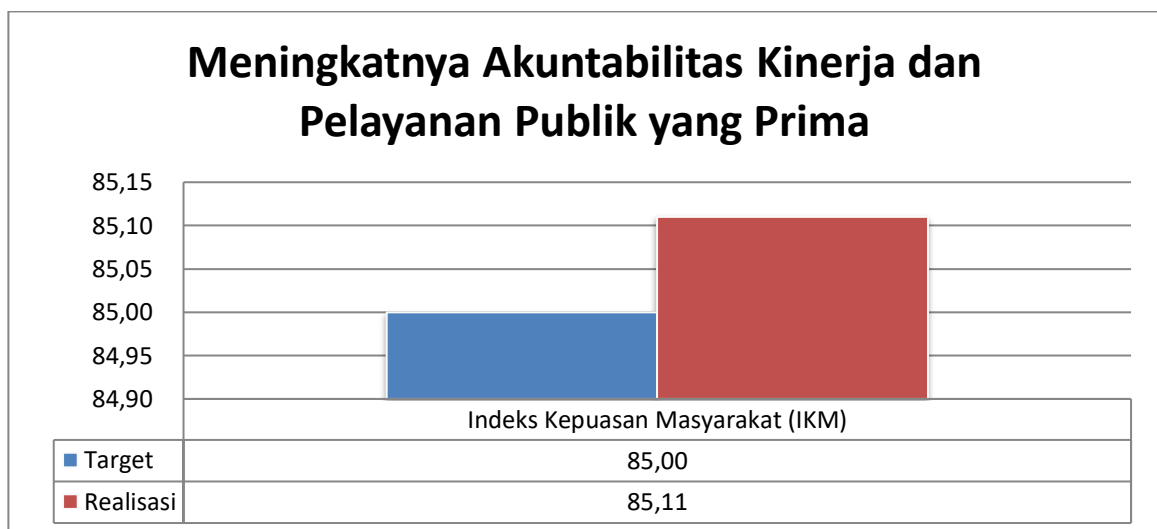
**Tabel 3.10**  
**Pencapaian Indikator Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik yang Prima Tahun 2018**

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2017		Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	5	4	6	7	8
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	nilai	80	75	85	85,11	100,13
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>				<b>93,75</b>			<b>100,13</b>

Sumber : Hasil Analisa, Tahun 2018

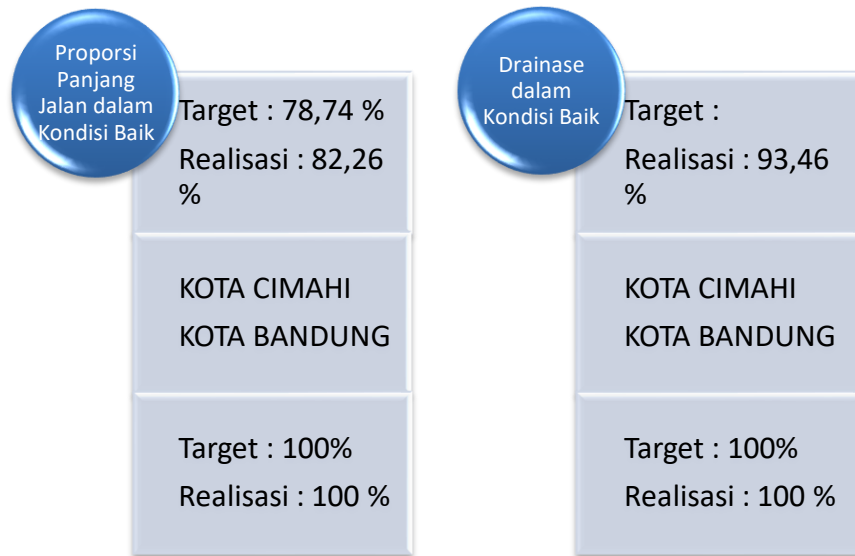
Realisasi Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 85% merupakan apresiasi atau tingkat kepuasan masyarakat Kota Bandung terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung dalam perbaikan jalan, PJU, Saluran drainase dan trotoar, dan sungai (hasil survey terlampir).

Sedangkan realisasi Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2017 sebesar 75% yang merupakan apresiasi atau tingkat kepuasan masyarakat Kota Bandung terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung dalam pelayanan peningkatan kualitas jalan, penerangan jalan, saluran drainase dan sungai. Sehingga dapat dikatakan capaian IKM Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung belum mengalami peningkatan setiap tahunnya dan belum mencapai target Renstra DPU.



### 3.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2018 DENGAN STANDAR NASIONAL MAUPUN INSTANSI LAIN

Terdapat 2 Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung yang dapat dibandingkan dengan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimahi, yaitu Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik, drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat, yang dapat diilustrasikan dalam Gambar 3.2.



**Gambar 3.2**  
**Perbandingan IKU DPU Kota Bandung dengan IKU DPU Kota Cimahi**

Sumber : LAKIP Kota Cimahi 2014 (diolah), dan LKIP Kota Bandung 2018

### **3.4 PENGUKURAN EVALUASI, DAN ANALISIS CAPAIAN TERHADAP TARGET RENSTRA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN**

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2013-2018. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung Tahun 2013-2018 sebanyak 5 (*lima*) sasaran.

Pada tahun 2017 dan 2018 setelah reviu Renstra dan IKU ditetapkan 4 (*empat*) sasaran strategis dengan 7 (*tujuh*) indikator kinerja yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Dari 4 (*empat*) sasaran dengan indikator kinerja sebanyak 7 (*tujuh*) indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.11**  
**Pencapaian Target Sasaran**

No.	Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran setelah revidi	Tingkat Pencapaian					
				Melampaui target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
				Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Terwujudnya pembangunan infrastruktur jalan di PPK	1	-	-	-	-	-	-	-
2	Terwujudnya infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata	3	2	2	110,41				
3	Terwujudnya Bandung Caang Baranang	1	1			1	100		
4	Terselesaikannya Permasalahan Banjir di Kota Bandung	3	3			3	100		
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik yang Prima	1	1	1	100,13				
	<b>Jumlah</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>42,86</b>	<b>4</b>	<b>57,14</b>		

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, 2018

Dari 4 (empat) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.12**  
**Kategori Pencapaian Indikator Sasaran**

No.	Katagori	Jumlah Indikator	Persentase
<b>A.</b>	<b>Terwujudnya infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata</b>		
1	Melebihi/ Melampaui Target	2	100
2	Sesuai Target		
3	Tidak Mencapai Target		
<b>B.</b>	<b>Terwujudnya Bandung Caang Baranang</b>		
1	Melebihi/ Melampaui Target		
2	Sesuai Target	1	100
3	Tidak Mencapai Target		
<b>C.</b>	<b>Terselesaikannya Permasalahan Banjir di Kota Bandung</b>		
1	Melebihi/ Melampaui Target		
2	Sesuai Target	3	100
3	Tidak Mencapai Target		
<b>D.</b>	<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik yang Prima</b>		
1	Melebihi/ Melampaui Target	1	100
2	Sesuai Target		
3	Tidak Mencapai Target		

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, 2018

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan

datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/ penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir RENSTRA (Tahun 2018).
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di kota lain atau dengan standar internasional.

### **3.5 AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Selama Tahun 2018 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 541.683.944.526,48 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 360.317.382.660,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 66,52 %, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2018, Dinas Pekerjaan Umum kondisi

anggaran adalah Silpa Rp. 181.366.561.866,48. Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung pada Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.13**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum**  
**Kota Bandung Tahun 2018**

No.	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Terwujudnya Infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata	237.783.122.644,00	145.863.564.125,00	61,34
		20.156.511.212,00	16.271.539.289,00	80,73
2	Terwujudnya Bandung caang Baranang	107.206.403.405,98	68.018.924.820,00	63,45
3	Terselesaikannya Permasalahan banjir di Kota Bandung	56.652.784.289,00	24.386.440.658,00	43,05
		94.971.499.397,50	83.901.322.650,00	88,34
		8.043.651.371,00	7.291.007.723,00	90,64
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik yang Prima	16.869.972.207,00	14.584.583.395,00	86,45
	<b>Jumlah</b>	<b>541.683.944.526,48</b>	<b>360.317.382.660,00</b>	<b>66,52</b>

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung pada Tahun 2018.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada Tahun 2018 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.14**  
**Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Dinas Pekerjaan Umum**  
**Kota Bandung**  
**Tahun 2018**

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
<b>A.</b>	<b>Sasaran 1</b>				
1	Melebihi/ Melampaui Target	2	100	162.135.103.414,00	71,04
2	Sesuai Target				
3	Tidak Mencapai Target				
<b>B.</b>	<b>Sasaran 2</b>				
1	Melebihi/ Melampaui Target			68.018.924.820,00	63,45
2	Sesuai Target	1	100		
3	Tidak Mencapai Target				
<b>C.</b>	<b>Sasaran 3</b>				
1	Melebihi/ Melampaui Target			115.578.771.031,00	74,01
2	Sesuai Target	3	100		



No.	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
3	Tidak Mencapai Target				
<b>D.</b>	<b>Sasaran 5</b>				
1	Melebihi/ Melampaui Target	1	100	14.584.583.395,00	86,45
2	Sesuai Target				
3	Tidak Mencapai Target				

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, 2018

Sedangkan untuk analisis efisiensi anggaran Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.15.

**Tabel 3.15**  
**Analisis Efisiensi Anggaran**  
**Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2018**

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase Capaian Kinerja	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 (=4-5)
1	Terwujudnya Infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata	2	110,41	71,04	39,37
2	Terwujudnya Bandung caang Baranang	1	100	63,45	36,55
3	Terselesaikannya Permasalahan banjir di Kota Bandung	3	100	74,01	25,99
4	Meningkatnya Akuntabilitas	1	100,13	86,45	13,68

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase Capaian Kinerja	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 (=4-5)
	Kinerja dan Pelayanan Publik yang Prima				
	<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>410,54</b>	<b>294,95</b>	<b>115,59</b>

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, 2018

Pencapaian Misi pada Tahun 2018 merupakan pencapaian kinerja tahun keempat Renstra 2013-2018, dengan demikian diuraikan pula capaian sasaran berdasarkan realisasi anggaran selama kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai berikut :

**Tabel 3.16**  
**Penyerapan Anggaran pada setiap Sasaran Dinas Pekerjaan Umum**  
**Kota Bandung 2013-2018**

No	Sasaran	Pagu Indikatif Renstra (Rp.)	Realisasi Anggaran tahun ke-				Jumlah	% (dari Pagu Indikatif)
			Jumlah s/d Tahun ke- 2	3	4	5		
1	Sasaran 1	10.939.424.155	51.348.424.392	-	-	-	51.348.424.392	469,39
2	Sasaran 2	1.767.369.173.658	427.517.677.046	235.561.236.859	106.304.155.016	162.135.103.414	931.518.172.335	52,71
3	Sasaran 3	445.108.426.954	118.876.293.252	63.990.719.100	54.917.671.767	68.018.924.820	305.803.608.939	68,70
4	Sasaran 4	1.646.937.668.138	314.874.924.158	271.008.612.755	207.905.736.072	115.578.771.031	909.368.044.016	55,22
5	Sasaran 5	3.179.508.425	1.149.713.450	919.751.675	316.783.688	14.584.583.395	16.970.832.208	533,76

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, 2018

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif / kurang efektif terhadap capaian kinerja sasaran organisasi.

### 3.6 REKOMENDASI HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN 2018

Rekomendasi perbaikan kinerja yang diperoleh dari hasil evaluasi dan analisis pencapaian kinerja sasaran yang tercantum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2018 berdasarkan sasaran strategis sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.17

#### REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM

No	Sasaran	Rekomendasi / Rencana Aksi
1	Terwujudnya infrastruktur jalan yang berkualitas, dan merata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan audit mutu kontruksi jalan dan audit beban muatan lebih angkutan barang</li> <li>2. Melakukan <i>engineering</i> audit terhadap jalan dan jembatan yang telah selesai dibangun dan diperbaiki.</li> <li>3. Menyediakan dan merencanakan pelengkap jalan.</li> <li>4. Meningkatkan kinerja URC Tambal Jalan dalam rangka pemelihara kondisi jalan dan responsive terhadap aspirasi dan keluhan masyarakat.</li> <li>5. Menyediakan cadangan bahan material perbaikan jalan sebagai antisipasi terhadap perubahan mendadak kondisi jalan.</li> </ol>
2	Terwujudnya Bandung Caang Baranang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan <i>engineering</i> audit terhadap PJU yang telah selesai dibangun dan diperbaiki.</li> <li>2. Mengembangkan <i>system smart monitoring</i> pada PJU yang telah ada dan terbangun secara bertahap dan mengkoneksikannya dengan sistem yang ada di Ruang Kontrol PJU serta <i>Bandung Command Centre (BCC)</i>.</li> </ol>

No	Sasaran	Rekomendasi / Rencana Aksi
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Meningkatkan kinerja URC PJU untuk memonitor kondisi PJU setiap hari.</li> <li>4. Mendorong dan meningkatkan kinerja Tim URC PJU dalam memelihara kualitas nyala lampu PJU dan responsive terhadap aspirasi masyarakat.</li> <li>5. Mengoptimalkan kinerja peralatan pendukung operasional pemeliharaan PJU.</li> <li>6. Meterisasi terhadap semua PJU yang telah terpasang.</li> <li>7. Menyediakan cadangan bahan material dan komponen pju sebagai antisipasi terhadap perubahan mendadak kondisi dan kinerja pju serta vandalisme.</li> <li>8. Melakukan sosialisasi program pemeliharaan infrastruktur kebinamargaan dan pengairan melalui media banner pada tiang-tiang pju untuk mengajak masyarakat mencintai dan merawat infrastruktur yang perlengkapan jalan yang telah dibangun dan disediakan.</li> </ol>
3	Terselesaikannya Permasalahan Banjir di Kota Bandung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan <i>engineering</i> audit terhadap saluran drainase yang telah selesai di bangun dan di perbaiki</li> <li>2. Melakukan <i>engineering</i> audit terhadap rumah pompa dan kolam retensi yang telah dibangun serta melakukan pemeliharaan agar berfungsi dengan baik dan berumur panjang</li> <li>3. Menganggarkan, mendorong dan meningkatkan kinerja UPT dalam pemeliharaan dan normalisasi saluran drainase dan saluran sungai sebagai upaya penanganan rutin banjir kurang dari 2 jam</li> <li>4. Meningkatkan kinerja URC saluran dan URC sungai</li> <li>5. Mengoptimalkan kinerja peralatan pendukung operasional pemeliharaan saluran drainase, pembuatan sumur resapan dan pengerukan sedimentasi sungai</li> </ol>

No	Sasaran	Rekomendasi / Rencana Aksi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>6. Pemeliharaan rutin terhadap tali-tali air dari penumpukan sampah dan sedimen.</li> <li>7. Melakukan sosialisasi program untuk meningkatkan kepedulian, kecintaan dan kesadaran masyarakat akan kebersihan saluran dan sungai melalui pemasangan <i>signage</i>.</li> <li>8. Membuat kajian mitigasi kirmir rawan longsor agar dapat direncanakan kebutuhan dan proses rehabilitasinya.</li> </ul>
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik yang Prima	1. Monitoring dan Evaluasi Survey Kepuasan Pelayanan Masyarakat pada OPD

Sumber: Hasil Analisa, Tahun 2018

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung Tahun 2018 ini merupakan pertanggung-jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Pemerintah Kota Bandung Tahun 2018. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung Tahun 2018 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, dan uraian analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan serta upaya meningkatkan kinerja yang belum tercapai.

Pada Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 110,41% atau interpretasi memuaskan.

Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100% atau interpretasi memuaskan.

Sasaran 3 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 100% atau interpretasi memuaskan.

Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,13% atau interpretasi memuaskan.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 (empat) sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai (rata – rata 102,99%) dalam kisaran > 100 yang termasuk dalam Interpretasi *Memuaskan*. Dalam Tahun Anggaran 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung untuk melaksanakan target kinerja yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun 2018 sebesar Rp. 541.683.944.526,48 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 360.317.382.660,00 atau dengan serapan dana APBD 66,52 %, dan SILPA Rp. 181.366.561.866,48.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Bandung, Januari 2019

**KEPALA DINAS  
PEKERJAAN UMUM,**



**Ir. H. ARIF PRASETYA S, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196008251990111001